

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan kesejahteraan sosial ialah diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya, yakni lingkungan masyarakat yang memiliki ciri dinamis dan sehat. Dinamis mencirikan suatu masyarakat yang antara satu dengan lainnya saling bekerjasama, tolong menolong dan bersinergi untuk mencapai kesejahteraan; sedangkan sehat ialah mencerminkan pola hidup dan kehidupannya senantiasa memperhatikan keberlangsungan kesehatannya, baik kesehatan individu dan keluarga, maupun kesehatan di lingkungannya masing-masing. Pada masyarakat miskin terutama masyarakat perkotaan yang ada di Indonesia memiliki suatu ciri diantaranya ialah masyarakat yang hidup di suatu pemukiman yang memiliki kualitas yang kurang (rendah), memiliki tingkat pendidikan yang kurang, masyarakat yang bekerja disuatu sektor informal dan mempunyai upah yang rendah, memiliki suatu jaminan dalam pekerjaan serta memiliki layanan dasar dengan akses yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat biasa (tidak miskin). Pada masyarakat miskin terutama diperkotaan berfokus pada di Pulau Jawa, dimana memiliki suatu karakteristik yang berkarakter kota serta pada masyarakatnya padat penduduk, dimana dalam hal ini pada masyarakat di Indonesia terutama di Pulau Jawa memiliki lebih dari 2/3 rakyat miskin (PNPM *Support Facility*)¹

¹ PNPM Support Facility. 2013. *Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program*. Jakarta: Menkokesra, Kementerian PU dan PNPM Mandiri

Sasaran pelayanan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial ialah ditujukan pada masyarakat yang dipandang memiliki nasib yang kurang beruntung seperti mereka yang mengalami hambatan baik dari sisi pendapatannya maupun secara sosial, dengan tujuan agar kesejahteraan mereka menjadi layak dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan di masyarakat. Keadaan masyarakat seperti ini ialah secara resmi ditanggulangi oleh Dinas Sosial, dan masyarakat seperti ini disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan lembaga lain yang ikut membantu memecahkan masalah sosial ialah kelompok Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Sementara itu lembaga Dinsos (Dinas Sosial) bertugas melakukan pembinaan serta kerjasama dengan mitra kerjanya, yakni PSKS. Upaya pembinaan ini ialah diarahkan pada pembinaan dan pengembangan kemandirian PSKS dalam penanganan PMKS. Adapun yang termasuk kedalam kelompok PSKS² adalah Pekerja Sosial (Profesional), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Pioneer, Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dunia Usaha.

Memperhatikan jenis-jenis mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Dinsos dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial daerah Kota Bandung khususnya ialah sangat menarik untuk dilihat seberapa besar kontribusi

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang *Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial*, poin B. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial /PSKS.

yang dilaksanakan untuk ikut memecahkan persoalan-persoalan sosial yang ada, apalagi kalau ditinjau dari hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinsos Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Jabar tahun 2013 sampai 2018, bahwa secara umum isu-isu strategis bidang sosial yaitu: ³ kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan; belum optimalnya Penanggulangan bencana alam dan bencana Social; belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Satu sisi, kecenderungan peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan sisi lain ialah belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan PSKS ialah menjadi masalah yang sangat menarik untuk diteliti, khususnya perihal faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan di lapangan sehingga pemanfaatan dan pendayagunaan PSKS belum optimal. Tentunya perlu ditelaah lebih lanjut perihal peran yang sebenarnya terjadi di masyarakat untuk dicari pemecahan yang tepat, sehingga target pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dalam penanganan PMKS lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Meskipun telah dilakukan beberapa upaya Dinas Sosial Jawa Barat dalam menangani masalah PMKS pada tahun 2013-2018 seperti: (1) Program prioritas Bebas PMKS dapat diatasi melalui pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

³ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2013 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis bidang sosial (4.1.22.)*

Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial serta Penjaminan Sosial; (2) Revitalisasi, Optimalisasi dan Fasilitasi Balai atau Panti Sosial; (3) Meningkatkan efektifitas, kapasitas dan kualitas pada Potensi dan Sumber. Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; (4) Mengoptimalkan kemitraan dengan seluruh stakeholder lainnya diantaranya seperti Dinas maupun suatu Instansi yang terkait, Perguruan Tinggi, PSKS dan juga dunia usaha untuk mengupayakan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial;

(5) Meningkatkan Sinergitas dan Jejaring Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan multi *Stake Holder* serta Mitra Kerja; namun semuanya itu belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Tentunya, kemiskinan itu bisa terjadi ketika seseorang atau individu dalam suatu masyarakat mengalami ketidakmauan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tantangan kehidupan yang ada, sehingga kehidupan mereka mengalami ketidak seimbangan antara kebutuhan dan pendapatan.

Mengingat kemiskinan yang multidimensi ini atau memiliki faktor yang banyak, dalam suatu masyarakat adanya suatu permasalahan kemiskinan dimana permasalahan tersebut merupakan suatu masalah yang kompleks dimana mencakup beberapa sektor. Karena adanya suatu kompleksitas yang didapat maupun dimiliki, dalam hal penanggulangan terhadap kemiskinan harus adanya suatu program yang integrasi atau terpadu serta tidak bertumpuk. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang ada di Indonesia bahkan merupakan suatu permasalahan yang utama yang harus dicari jalan keluarnya. Dalam menanggulangi suatu kemiskinan harus dilakukan secara sistematis serta harus

dilakukan secara bersamaan oleh pihak-pihak lainnya agar masyarakat dapat hidup secara layak.

Munculnya masyarakat miskin tidak tiba-tiba ada, tentu mempunyai tanda atas belum mempunyai dalam beberapa hal: (a) terpenuhinya semua kebutuhan dasar, (b) usaha produktif yang dilakukan agar dapat berjalan baik, (c) memperhatikan sumber daya, baik itu ekonomi dan sosial yang terjadi akibat rendahnya daya tawar dan keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia (d) teratasinya berbagai resiko penyakit, adanya bencana alam, gagal panen yang berakibat terjualnya aset produksinya (e) harus adanya rasa percaya diri dan mental yang baik agar tersebar dari rantai kemiskinan.⁴

Dalam memahami orang-orang yang berstatus miskin tidak cukup dengan mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang mempunyai anggapan jika orang miskin itu tidak mau berusaha, pemalas, dan boros. Orang-orang miskin sering dianggap tidak beruntung karena suatu hal, ada faktor yang membuat hal ini terjadi⁵. Masalah kemiskinan tidak tiba-tiba terjadi di Indonesia, namun masalah kemiskinan cenderung terjadi pada perempuan dan memang pada keutamaannya perempuan lebih menderita dibandingkan laki-laki ketika ada dalam posisi miskin⁶.

Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut tentang “Peran Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial Dalam Menangani

⁴ Adisasmito, W. 2008. *Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.hal.4

⁵ Soetrisno, L. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisus.hal 7-8

⁶ Andari, A. J..2011. *Analisis Viktimisasi Struktural terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*. Kriminologi Indonesia,hal.311.

Penyandang Kemiskinan Lanjut Usia Terlantar Di Perkotaan (Studi Deskriptif PSKS terhadap Penanganan Kemiskinan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Bandung)”

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan diteliti ialah didasarkan pada belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan lanjut usia di perkotaan, khususnya Kota Bandung.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah itu, maka rumusan masalah penelitian yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana program penanganan kemiskinan lanjut usia di perkotaan yang dilakukan Dinas Sosial dengan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Dinas Sosial Kota Bandung?
2. Bagaimana kegiatan lanjut usia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Bandung?
3. Bagaimana peran Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial dalam menangani masalah kemiskinan lanjut usia di Kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui program penanganan kemiskinan lanjut usia di perkotaan yang dilakukan Dinas Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui kegiatan lanjut usia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui peran Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial dalam menangani masalah kemiskinan lanjut usia di Kota Bandung.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritik

Manfaat dari penelitian ini dapat berkontribusi pada belum optimalnya peran penanganan masalah sosial yang dilakukan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan lanjut usia di perkotaan, khususnya Kota Bandung, yakni:

- a. membantu dalam memberikan penjelasan tentang program, kegiatan dan peran yang telah dilakukan PSKS sebagai mitra Dinas Sosial dalam mengatasi masalah-masalah sosial.
- b. Manfaat Hasil dari karya ilmiah ini semoga dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus Jurusan Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktik dari penelitian ini bisa sebagai informasi ilmiah, diantaranya:

a. Manfaat untuk Akademisi

Hasil karya ilmiah ini secara akademik ini dapat berguna untuk semua sivitas akademik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam konteks penambahan wawasan akademik, rujukan ilmiah dan dapat menambah pustaka yang ada, dan khususnya bagi mahasiswa sosiologi, terkhusus untuk para peneliti selanjutnya dengan kajian-kajian dari sudut pandang yang berbeda.

b. Manfaat untuk Peneliti

Manfaat untuk peneliti sendiri, karya ilmiah ini bisa mendorong untuk lebih meningkatkan dan membuka wacana masalah-masalah social yang terjadi di masyarakat, sehingga bisa memperjelas peta dan strategi strategi apa yang dapat dilakukan selanjutnya dalam mengatasi masalah-masalah social yang ada.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2009⁷ pasal 1 dan 2, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat hidup dengan layak dimana berbagai kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi sehingga masyarakat dapat mengembangkan diri mereka sendiri serta mampu menjalankan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial ini dapat terwujud apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat bekerja sama mewujudkannya dengan cara melakukan pelayanan sosial dalam bentuk perlindungan sosial, pemberdayaan sosial maupun rehabilitasi sosial.

Bahwa kesejahteraan sosial⁸ merupakan suatu ilmu yang mengembangkan suatu kerangka pemikiran dan metodologi, dimana metodologi tersebut bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan

⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*

⁸ Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 17

masalah sosial, dimana hal tersebut sebagai pemenuhan hidup masyarakat serta dapat memaksimalkan suatu kesempatan pada sekelompok masyarakat maupun anggota masyarakat agar dapat berkembang.

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan kesejahteraan sosial bisa bermanfaat bagi individu serta bagi masyarakat itu sendiri untuk dapat mendapatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri ialah menjadi identitas bahwa masyarakat itu sudah mengalami kemajuan. Secara umum kesejahteraan sosial biasanya diartikan sebagai suatu kondisi yang memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Konsep kesejahteraan sosial juga mengacu pada semua kegiatan yang menyelenggarakan dan mendistribusikan bakti sosial bagi kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pelaksanaan berbagai rencana perlindungan sosial formal dan informal merupakan salah satu contoh dari kegiatan kesejahteraan sosial.⁹

Kesejahteraan sosial berfungsi menghilangkan atau mengurangi berbagai tekanan yang menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini untuk menghindari konsekuensi sosial yang buruk dan negatif akibat pembangunan, sehingga tercipta kondisi yang mendorong peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Salah satu fungsi kesejahteraan sosial¹⁰ ialah:

⁹ Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰ Fahrudin, Adi. 2009. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora

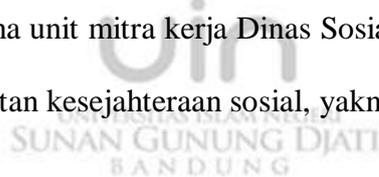
1. Fungsi preventif (*preventive*), memperkuat keluarga dan individu komunitas untuk menghindari masalah sosial baru. Pekerjaan pencegahan dalam masyarakat transisi menekankan pada kegiatan yang berkontribusi pada pembentukan hubungan sosial, sistem sosial baru dan pola baru. Hal ini dikatakan sebagai fungsi pencegahan.
2. Berfungsi menyembuhkan (*healing*), menghilangkan cacat fisik atau emosional dan interaksi sosial, karena orang yang menghadapi masalah tersebut dapat bekerja secara normal di masyarakat. Fungsi pemulihan juga terpenuhi dalam fungsi pemulihan ini.
3. Fungsi pembangunan (*development*), secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pembangunan struktur sosial dan sumber daya sosial. Inilah fungsi pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Fungsi penunjang (*support*), fungsi kesejahteraan sosial lainnya yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan departemen atau kegiatan di bidang pelayanan sosial, adalah fungsi pendukung.

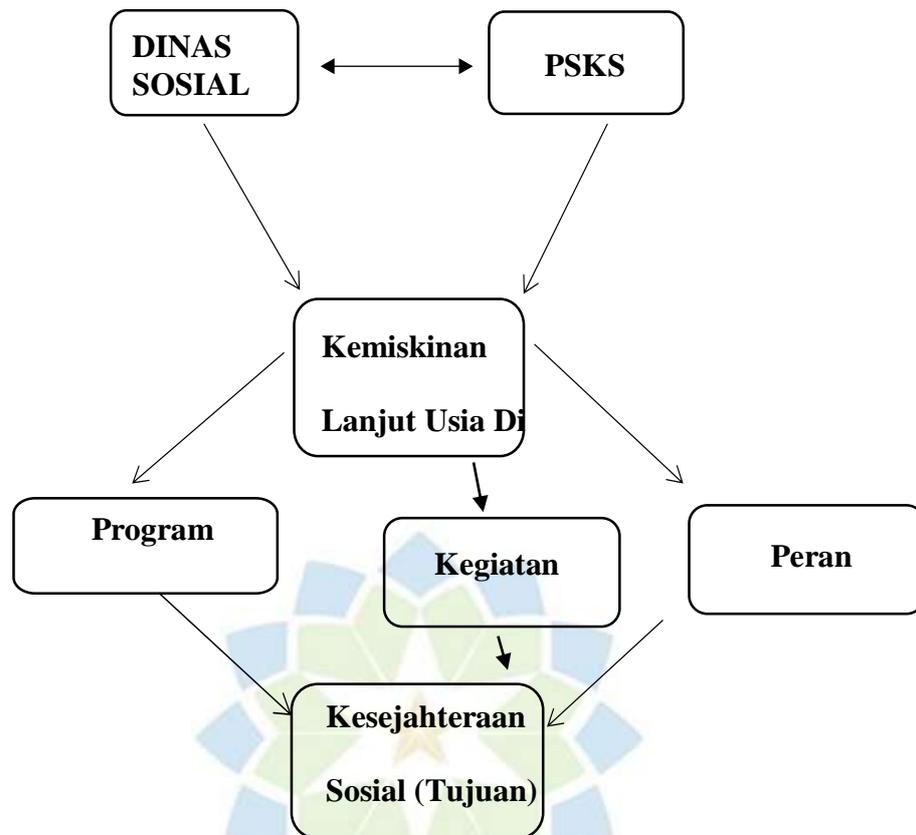
Selanjutnya, kesejahteraan sosial memiliki 3 macam jenis diantaranya ialah *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* serta *new contractarian approach*,¹¹. Dimana dalam pendekatan *Classical utilitarian*, dalam pendekatan ini bahwa pada kepuasan individu maupun kesenangan orang itu sendiri bisa bertambah serta dapat diukur dalam hal ini adanya suatu prinsip dimana prinsip tersebut bagi individunya, akan tetapi menurut masyarakat prinsip yang dipegang

¹¹ Sugiarto, Eddy. 2007. *Teori Kesejahteraan Sosial dan Pengukurannya*, Jurnal Eksekutif, Vol. 4, No. 2 p. 263-269

ialah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat itu sendiri. *Neo classical welfare theory*, bahwa manfaat dalam semua kepuasan yang ada dalam individu merupakan fungsi dalam kesejahteraan. *New contractarian approach*, pada pendekatan ini adanya suatu pengangkatan terhadap kebebasan secara maksimal pada hidup seseorang. Pendekatan ini menekankan ajaran seorang (individu) dapat memaksimalkan kebebasan mereka dalam mengejar ataupun mengimbangi suatu konsep individu tersebut terutama dalam permasalahan barang serta jasa dengan tidak adanya campur tangan individu atau masyarakat lain. Sama halnya dengan suatu kemampuan terhadap sumber daya tersebut serta diarahkan.

Ketiga pendekatan tersebut ialah terus menerus dikembangkan dan dilaksanakan oleh unit kerja dinas sosial, tentunya selaras dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia dandiarahkan pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dan salah satu kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah diarahkan pada sejauh mana unit mitra kerja Dinas Sosial mampu berperan secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, yakni:





Gambar 1 Skema Konseptual

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa secara kelembagaan, dalam rangka penanganan kemiskinan lanjut usia di perkotaan di kota Bandung, Dinas Sosial tidak sendirian mengatasinya, melainkan ia bekerjasama atau bermitra dengan unsur Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dimasyarakat seperti: Pekerja. Sosial. (Profesional), . Pekerja. Sosial. Masyarakat. (PSM), . Taruna. Siaga. Bencana. (TAGANA), . Lembaga. Kesejahteraan. Sosial. (LKS), . Karang. Taruna, . Lembaga. Konsultasi. Kesejahteraan. Keluarga, . Keluarga. Pioneer, Wahana. Kesejahteraan. Sosial. Keluarga. Berbasis. Masyarakat. (WKSBM), . Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh. Sosial, Tenaga. Kesejahteraan. Sosial. Kecamatan. (TKSK), . dan Dunia. Usaha. Mereka mengembangkan beberapa program agar kesejahteraan sosial itu tercapai.

Tentunya dari beberapa pelaksanaan program dilapangan ialah masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat, terutama kaitannya dengan seberapa banyak peran yang dapat disumbangkan PSKS dalam ikut mengurangi masalah-masalah sosial.

